

SISTEM INFORMASI PEMBERKASAN ADMINISTRASI PADA PENGADILAN NEGERI RANTAU KELAS II

Riska Apriliani¹, As Ary Ramadhan², Desy Ika Puspitarsi³

¹Sistem Informasi, 57201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM : 18710042

²Sistem Informasi, 57201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN : 1129039101

³Sistem Informasi, 57201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN : 1123128402

Email : riskazharifa862@gmail.com / no. hp 081250916441

ABSTRAK

Proses pengolahan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Kantor Pengadilan Negeri Rantau Kelas II sampai saat ini masih menggunakan aplikasi perkantoran yang sederhana. Oleh karena itu, sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan proses pengolahan SPPD, diantaranya sering terjadi kesalahan Nama dan NIP Pegawai, Jabatan, Biaya, kehilangan berkas pencairan yang telah dicetak dan belum adanya sistem yang terkomputerisasi membuat proses pengolahan SPPD ini menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Maka diperlukan suatu sistem komputerisasi yang sangat sesuai untuk mendukung kinerja dalam pengelolaan SPPD, sehingga dapat mengatasi permasalahan atau kendala pada sistem berjalan saat ini Metode berorientasi objek dengan alat bantu *software* UML (*Unified Modeling Language*), pengamatan langsung, dan wawancara kepada pihak yang terkait menjadi analisa sistem yang digunakan untuk membangun sistem baru dalam penelitian ini. Memanfaatkan sistem komputersisasi yang diusulkan ini secara baik kemungkinan adanya kesalahan dapat diminimalisasi serta pengolahan SPPD menjadi lebih mudah. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa di tambahkan aplikasi *sms gateway* untuk mengkonfirmasi status SPPD.

Keyword : *Komputerisasi, SPPD, UML.*

1. PENDAHULUAN

Pada Pengadilan Negeri Rantau Kelas II mempunyai kegiatan perjalanan Dinas, yang mana surat perintah perjalanan Dinas sangat diperlukan untuk bahan pertanggung jawaban perjalanan Dinas harus dibuat dan diarsipkan agar setiap pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut memiliki rekap data, untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi serta mempermudah pembuatan dan penyimpan atau persipan data perlu memiliki sebuah program yang dapat mempermudah dalam manajemen, sehingga dapat memberikan informasi yang terstruktur dan mempercepat kinerja dalam hal pembuatan surat. Pembuatan dan penyimpanan adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan keamanan data, karena surat perintah perjalanan Dinas digunakan sebagai bukti

penting perjalanan Dinas, bukti surat dalam penyimpanannya tidak beraturan dan pembuatan membutuhkan waktu dalam pengerjaan.

Keadaan itu menyebabkan membuat pengarsipan dan pembuatan memakan waktu. Pada Pengadilan Negeri Rantau Kelas II memerlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu pembuatan dan pengarsipan yang cepat, tepat dan akurat, dalam pembuatan dan pengarsipan pada Pengadilan Negeri Kelas II Rantau data masih menggunakan *Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel*. Upaya dalam pembuatan dan pengarsipan akan berhasil dengan perubahan yang lebih baik pada sistem yang ada, sehingga apabila terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam pengelolaan yang menyita banyak waktu dan banyak tenaga dapat diperkecil, untuk itu, membuat sistem informasi yang dapat

6. REFERENSI

- Aliska, S. (2018). Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara di Kejaksaan Negeri Mampawah. *Sistem dan Teknologi Informasi*, 6, 1-7.
- Ananda, N., Gayatri, & Nawassyarif. (2021, Februari). Sistem Informasi Pendataan Dan Pengarsipan Berkas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Sumbawa Dengan Metode Waterfall. *pengantar teknologi*, 3.
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Apriyanto, & Putra, Y. P. (2020). Perancangan Aplikasi *Web* Penjualan Pakaian Muslim. *SIMADA*, 03, 1-69.
- Arizona, & Kaunen. (2017). Aplikasi Pengelolaan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada Kantor Desa Bakau Kecamatan Jawai Berbasis *Web*. *Teknologi Informasi*.
- Haryadi, H. (2009). Administrasi Perkantoran untuk manajer dan staff. *Pengantar teknologi*.
- Kacaribu, A. H. (2020). Pengertian administrasi dan tujuan-tujuan administrasi. *Pengantar Ilmu Admnistrasi*.
- Lumbangaol, M. H., & Ridho, M. R. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Dan Penyewaan Properti Berbasis *Web* Di Kota Batam. *Comasie*, 3, 32-41.
- Sembering, S. F. (2016). Pengarsipan Digital Produk Informasi. *Perpustakaan dan Informatika*, 10, 1-11.
- Stalling. (2005). *Operating Systems, Internals and Design Principles*. Pearson: Prentice Hall.
- Suendri. (2019). Implementasi Diagram UML (Unified Modelling Language) Pada Perancangan Sistem Informasi Remunerasi Dosen Dengan Database Oracle (Studi Kasus: UIN Sumatera Utara Medan). *Ilmu Komputer dan Informatika*, 2, 1-9.
- Sutikno. (2019). Pengembangan Sistem Informasi Bidang Administrasi Desa Soket Dajah Kecamatan Tragah Berbasis *Web*. *Pangabdhi*, 1-6.
- Wijaya, Y. D. (2021). Pengujian Blackbox Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan Pt Inka (Persero) Berbasis Equivalence Partitions. *Digital Teknologi Informatika*, 4, 1-16.